



MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS

Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan (PPKn)

SMP/MTs KELAS IX

Berdasarkan Kurikulum 2013



2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BERKERJASAMA DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS

**Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan (PPKn)**

SMP/MTs KELAS IX

(Berdasarkan Kurikulum 2013)

2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BEKERJASAMA DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TIM PENYUSUN

I. Pengarah

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia

II. Narasumber

1. Drs. Aliyas, M.Pd
2. AKBP Subono, S.Pd., SH., M.M

III. Penulis

1. Dr. Arnie Fajar, M.Pd
2. Dr. Achmad Husen, M.Pd
3. Drs. Supandi, M.Pd

IV. Produksi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Tahun Anggaran 2017

Edisi Revisi
Cetakan Ke-VII, 2017

ISBN 978-602-73155-7-0

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif sebagai penanaman nilai dan norma, termasuk di dalamnya nilai disiplin, etika, dan budaya berlalu lintas bagi peserta didik, dalam hal ini peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan sikap dan perilaku disiplin, etika, dan budaya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ini, menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan formal (persekolahan) maupun informal. Pelaksanaan penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas (PLL) ke dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pendidikan Lalu Lintas yang diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK secara berkelanjutan ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa mengabaikan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan keteladanan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas ini, disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013, sehingga Pendidikan Lalu Lintas di SMP/MTs dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian peserta didik bertanggung jawab dan berperilaku disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

Jakarta, Maret 2017



Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 195905121983111001



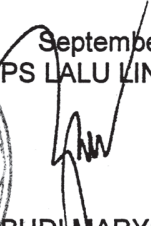
KATA PENGANTAR
KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI

TINGKAT KESELAMATAN, KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KARENA RENDAHNYA BERLALU LINTAS DIMANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MERUPAKAN PERAN STRATEGIS DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI YANG TENTUNYA PERLU ADANYA DUKUNGAN, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI SEBAGAI UPAYA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, SEBAGAIMANA DI AMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945, KEMUDIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERANNYA GUNA MENGEMBANGKAN MODA TRANSPORTASI YANG SECARA TEGAS BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN KESELAMATAN KETERTIBAN DAN KELANCARAN BERLALU LINTAS SECARA TERPADU GUNA MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT, PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA MAMPU MENJUNJUNG TINGGI MARTABAT BANGSA.

DENGAN INI SAYA SELAKU KAKORLANTAS POLRI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, APRESIASI DAN PENGHARGAAN KEPADA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS KERJASAMANYA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LALU LINTAS YANG TERINTEGRASI PADA MATA PELAJARAN PPKn JENJANG SD/MI, SMP/MTS DAN SMA/MA YANG SEDERAJAT, TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN JUGA KEPADA TIM PENYUSUN YANG TELAH MENYELESAIKAN BUKU MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS INI DENGAN BAIK

OLEH KARENA ITU DI TINJAU DARI ASPEK PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS SANGAT MENJADI PERHATIAN, YANG MENEKANKAN PADA PEMBELAJARAN ETIKA, SOPAN SANTUN DAN BUDAYA SERTA PAHAM PENGATURAN BERLALU LINTAS YANG DI LAKSANAKAN MELALUI PEMBINAAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN LALU LINTAS SEJAK USIA DINI GUNA MEMINIMALISIR KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG CENDERUNG DOMINAN PADA USIA SEKOLAH PENYEBABNYA PELANGGARAN DAN RENDAHNYA PENGETAHUAN SERTA KURANG DISIPLIN DALAM BERLALU LINTAS.

SELANJUTNYA SAYA BERHARAP BUKU MODEL PENDIDIKAN LALU LINTAS YANG TERINTEGRASI PADA MATA PELAJARAN PPKn INI DAPAT DISEBARLUASKAN DAN DIIMPLEMENTASIKAN, DISOSIALISASIKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI SELURUH INDONESIA, SEMOGA BUKU INI SEBAGAI PANDUAN DAN BERMAMFAAT BAGI PESERTA DIDIK UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN KESELAMATAN KETERTIBAN DAN KELANCARAN BERLALU LINTAS DALAM RANGKA MENUJU INDONESIA TERTIB BERSATU KESELAMATAN NOMOR SATU SEHINGGA MENJADI PELOPOR KESELAMATAN BERLALU LINTAS DAN BUDAYAKAN KESELAMATAN SEBAGAI KEBUTUHAN.

Jakarta, September 2016
KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI

Drs. AGUNG BUDI MARYOTO, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

DAFTAR ISI

	Halaman
PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan dan Sasaran	5
D. Manfaat	6
E. Ruang Lingkup	6
BAB II TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS IX TERHADAP PENDIDIKAN LALU LINTAS	9
BAB III MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS KE DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS IX	27
A. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Materi Pembelajaran	27
B. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Silabus	51
C. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	74
BAB IV PENUTUP	91
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang”. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Undang-Undang Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa “pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa “Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.” Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 dinyatakan bahwa “Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.”

Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk lulusan SMP pada aspek sikap (*attitude*) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan

keberadaannya. Sedangkan aspek pengetahuan (*knowledge*) adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak nyata, serta aspek keterampilan (*skill*) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis.

Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang berakibat kepada terjadinya kecelakaan, yang sebagian besar terjadi pada generasi muda. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menata kurikulum pendidikan yang mampu menumbuhkan etika dan budaya berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (*kamseltibcarlantas*). Hal ini sejalan dengan diundangkannya UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindak lanjut dari UU tersebut, maka dilakukan penandatanganan nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* antara Mendiknas dan Kapolri No: 03/III/KB/2010 dan No: B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang "Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional." Kemdiknas melalui Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2010 membentuk Tim Teknis guna menyiapkan dan mengembangkan model pendidikan lalu lintas di sekolah. Hasil dari tim tersebut adalah Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Model pengintegrasian tersebut dibahas melalui workshop secara nasional tahun 2010 yang dihadiri oleh pakar pendidikan, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, para pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru PKn. Peserta workshop menyepakati bahwa Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PKn dapat dilaksanakan di sekolah. Sebagai tindak lanjut dilakukan diseminasi di Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan.

Sejalan dengan perubahan kurikulum Tahun 2013 dan beberapa peraturan pendukung yang berlaku, maka Kemdikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar melakukan penyempurnaan Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas

melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Hasil penyempurnaan buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan dipergunakan sebagai materi dalam kegiatan workshop dan diseminasi di sekolah-sekolah rintisan.

Secara konseptual dapat dikemukakan bahwa PPKn adalah pengorganisasian dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengan negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PPKn di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian secara substansi mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah faktual khususnya penanaman nilai dan norma berlalu lintas.

PPKn merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional, antara lain pengendara yang tidak sopan/ugal-ugalan, kurang menghormati sesama pengguna jalan, munculnya geng motor, pembalap liar, di sisi lain angka kecelakaan yang terus meningkat kualitasnya, kerugian material yang tidak sedikit jumlahnya. PPKn memiliki misi mengembangkan keadaban dan membudayakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas intelektual, spiritual, sosial dan emosional serta cerdas kinestetiknya dalam berlalu lintas. Adapun fungsi PPKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; dalam hal ini adalah karakter berlalu lintas.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia.
7. *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Mendiknas dan Kapolri Nomor 03/III/KB/2010 dan No. B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang "Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional."
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan.
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM).
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, beserta salinannya.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

C. Tujuan dan Sasaran

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PPKn ini sebagai panduan bagi:

1. Guru SMP/MTs:

- a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas;
- b. mengintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn;
- c. mengintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn;
- d. mengintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn dan;
- e. mengimplementasikan pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.

2. Kepala SMP/MTs:

- a. sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis dalam mengimplementasikan pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas;
- b. sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas dan;
- c. sebagai acuan dalam rangka sosialisasi pendidikan lalu lintas terhadap guru di lingkungan sekolahnya.

3. Pengawas sekolah SMP/MTs.

- a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi monitoring implementasi pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas.
- b. acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas.
- c. acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SMP/MTs. Yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas.

4. Bagi Kepolisian:

- a. sebagai pedoman dalam rangka melakukan kemitraan dengan satuan pendidikan;
- b. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kemitraan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan.

5. Bagi Dinas Pendidikan:

- a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring program diseminasi model pengintegrasian pendidikan lalu lintas melalui mata pelajaran PPKn SMP/MTs di daerah kabupaten/kota;
- b. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran daerah kabupaten/ kota dalam mengimplementasikan Pendidikan Lalu Lintas..

D. Manfaat

Setelah menggunakan model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepolisian, dan dinas pendidikan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan yang tertib, dengan mengembangkan kebiasaan (*habit*) taat berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari;
2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (a) sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*) termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic committment, and civic responsibility*); (b) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*); (c) keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*);
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan lalu lintas yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran PPKn.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman lalu lintas ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik, yang dikemas secara pedagogis dengan mengembangkan hal-hal sebagai berikut.

Dimensi dan Indikator PLL	Materi PLL
1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan.	1. Pengertian a. Lalu lintas b. Rambu-rambu lalu lintas c. Marka jalan, alat pemberi isyarat pengatur lalu lintas d. Pengamanan diri sebagai pemakai jalan e. Tata cara berlalu lintas dengan benar. f. Peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun

Dimensi dan Indikator PLL	Materi PLL
g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas. c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain. e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.	2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. g. Keselamatan lalu lintas h. Keamanan lalu lintas i. Ketertiban lalu lintas j. Kelancaran lalu lintas k. Tindakan pengaturan dalam keadaan tertentu. 2. Dua belas (12) gerakan tangan pengaturan lalu lintas, isyarat bunyi dan isyarat cahaya. 3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS). 4. Pasal-pasal tertentu Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 5. Dekade Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia melalui jalur pendidikan formal keselamatan jalan. 7. Surat ijin mengemudi (SIM). 8. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. a. Penggolongan jalan b. Pengolongan jenis kegiatan 9. Tips aman perjalanan a. Pemahaman terhadap karakteristik dan komponen rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, kendaraan, helm SNI b. Tri siap, yaitu: 1) Siap aturan; 2) Siap diri; 3) Siap kendaraan.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pengembangan model pengintegrasian nilai dan norma berlalu lintas pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas
2. Pengintegrasian nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn
3. Pengintegrasian nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn.
4. Pengintegrasian nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn.
5. Implementasi pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.

BAB II

TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) TERHADAP PENDIDIKAN LALU LINTAS

Kurikulum 2013 berisi Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dijabarkan menjadi 4 (empat) kompetensi inti (KI), yaitu: sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan keterampilan (KI-4). Masing-masing kompetensi inti dijabarkan ke dalam sejumlah kompetensi dasar (KD) yang menjadi dasar dan landasan dalam pengembangan proses pembelajaran.

Kompetensi dasar pada mata pelajaran PPKn di kelas IX yang terkait dengan aspek pengetahuan terdapat 6 (enam) KD, yaitu KD 3.1 s.d. 3.6. Berdasarkan telaah terhadap KD tersebut, maka yang dinilai relevan dan dapat diintegrasikan pendidikan lalu lintas ke dalamnya adalah 5 (lima) KD, yaitu KD 3.1 s.d. 3.5.

Kompetensi Inti:

- 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
- 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
- 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
- 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Telaah KI dan KD terhadap nilai-norma dan moral etika berlalu lintas dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menampilkan seluruh KD yang dikembangkan dari kompetensi inti ke dalam kolom sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan, sesuai dengan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014.

Aspek Spiritual	Aspek Sikap Sosial	Aspek Pengetahuan	Aspek Keterampilan
1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa	2.1 Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dengan dinamika perkembangan jaman.	3.1 Memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman
	2.2 Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa	3.2 Memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.2 Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
	2.3 Menghargai hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai wahana perwujudan keadilan dan kedamaian	3.3 Memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	4.3 Menyaji hasil telaah tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
	2.4 Menghargai sikap toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia	3.4 Memahami perbedaan baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	4.4 Menyaji sikap, tutur kata, dan perilaku yang baik, sesuai dengan nilai dan moral Pancasila dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat, bangsa dan negara
	2.5 Menghargai semangat dan komitmen sumpah pemuda sebagai perekat kebangsaan sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pemuda pada saat mendeklarasikan Sumpah Pemuda tahun 1928.	3.5 Memahami masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya	4.5 Menalar penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat
	2.6 Menghayati semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam	3.6 Memahami konteks kesejarahan NKRI	4.6 Menyaji hasil telaah dinamika penguatan komitmen mempertahankan NKRI dalam

Aspek Spiritual	Aspek Sikap Sosial	Aspek Pengetahuan	Aspek Keterampilan
	mengisi dan mempertahankan NKRI		konteks kesejarahan
			4.7 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender
			4.8 Menyaji bentuk-bentuk partisipasi dan tanggung jawab kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional

2. Mengidentifikasi KD yang dikembangkan dari Kompetensi Inti Pengetahuan yang dinilai relevan dengan dimensi dan indikator Pendidikan Lalu Lintas, kemudian diikuti KD yang dikembangkan dari KI Spiritual, KI sosial, dan KI Keterampilan.

No	Aspek Pengetahuan	Aspek Spiritual	Aspek Sikap Sosial	Aspek Keterampilan
1	3.1 Memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa	2.1 Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dengan dinamika perkembangan jaman 2.2 Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa	4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman
2	3.2 Memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa	2.4 Menghargai sikap toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. 2.6 Menghayati semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional	4.2 Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No	Aspek Pengetahuan	Aspek Spiritual	Aspek Sikap Sosial	Aspek Keterampilan
			dalam mengisi dan mempertahankan NKRI.	
3	3.3 Memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa.	2.3 Menghargai hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai wahana perwujudan keadilan dan kedamaian	4.3 Menyaji hasil telaah tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
4	3.4 Memahami perbedaan baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa.	2.4 Menghargai sikap toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia	4.4 Menyaji sikap, tutur kata, dan perilaku yang baik, sesuai dengan nilai dan moral Pancasila dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat, bangsa dan negara. 4.7 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender.
5	3.5 Memahami masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya.	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa.	2.5 Menghargai semangat dan komitmen sumpah pemuda sebagai perekat kebangsaan sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pemuda pada saat mendeklarasikan Sumpah Pemuda tahun 1928. 2.6 Menghayati semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI	4.5 Menalar penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat 4.7 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender.

No	Aspek Pengetahuan	Aspek Spiritual	Aspek Sikap Sosial	Aspek Keterampilan
				4.8 Menyaji bentuk-bentuk partisipasi dan tanggung jawab kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.
6	3.6 Memahami konteks kesejarahan NKRI (tidak relevan disisipkan pendidikan lalu lintas)	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa	2.5 Menghargai semangat dan komitmen sumpah pemuda sebagai perekat kebangsaan sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pemuda pada saat mendeklarasikan Sumpah Pemuda tahun 1928. 2.6 Menghayati semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI	4.6 Menyaji hasil telaah dinamika penguatan komitmen mempertahankan NKRI dalam konteks kesejarahan 4.7 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender. 4.8 Menyaji bentuk-bentuk partisipasi dan tanggung jawab kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.

3. Berdasarkan telaah terhadap KD sebagaimana dituangkan dalam langkah 2, maka KD yang dapat diintegrasikan dimensi dan indikator Pendidikan Lalu Lintas adalah sebagai berikut:

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi dan Indikator Pendidikan Lalu Lintas
1	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa. 2.1 Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila	1. Mensyukuri proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang diberkahi Allah SWT. 2. Meyakini kebenaran Pancasila sebagai	1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat pengatur lalu

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi dan Indikator Pendidikan Lalu Lintas
	sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dengan dinamika perkembangan jaman. 2.2 Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 3.1 Memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman.	dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 3. Mendeskripsikan ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara. 4. Mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman. 5. Menelaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman. 6. <u>Menuliskan contoh pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam penerapan peraturan lalu lintas baik ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik seperti menaati rambu-rambu lalu lintas, menghormati pengguna jalan, efektif dalam dalam perjalanan, mengutamakan rasa aman (menggunakan sabuk pengaman), dan nyaman (tidak saling menyerobot), membuat pengaturan tempat parkir di sekolah secara musyawarah untuk kepentingan bersama warga sekolah.</u> 7. <u>Menunjukkan perilaku disiplin, seperti tidak terlambat masuk sekolah/kelas, mengerjakan tugas yang diberikan guru, menverahkan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai peraturan sekolah, menghormati guru dan teman, menjaga keamanan dan kenyamanan</u>	lintas d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menaati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selalin kegiatan berlalu lintas. c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi dan Indikator Pendidikan Lalu Lintas
		kelas dan lingkungannya. 8. <u>Mempresentasikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman termasuk nilai-nilai positif dalam berlalu lintas.</u>	kesempatan pengguna jalan lain. e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan. 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi dan Indikator Pendidikan Lalu Lintas
			umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.
2	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa. 2.4 Menghargai sikap toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. 2.6 Menghayati semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. 3.2 Memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.2 Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	1. Bersyukur bahwa bangsa Indonesia memiliki rumusan pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 2. Menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai derajat yang sama walaupun berbeda agama, suku, budaya, adat istiadat, dan ras (kesetaraan). 3. Membenarkan adanya perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, dan ras. 4. Menyatakan makna persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. 5. Mendeskripsikan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 6. Menelaah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 7. Menyebutkan UU RI NO. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai implementasi dari pokok pikiran Pembukaan UUD negara RI tahun 1945.	1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menaati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi dan Indikator Pendidikan Lalu Lintas
		8. Mempresentasikan hasil telaah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	menghormati sesama pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas. c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain. e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi dan Indikator Pendidikan Lalu Lintas
			sesame pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.
3	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa. 2.3 Menghargai hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai wahana perwujudan keadilan dan kedamaian. 3.3 Memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4.3 Menyaji hasil telaah tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	1. Menyukuri bahwa negara Indonesia telah memiliki hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. <u>Membenarkan perilaku taat terhadap hukum, sebagai berikut:</u> a. <u>menaati rambu-rambu lalu lintas.</u> b. <u>Menati marka jalan lalu lintas.</u> c. <u>Menaati isyarat pengaturan lalu lintas</u> d. <u>Melengkapi pengamanan diri dalam berlalu lintas</u> e. <u>menghormati pengguna jalan.</u> f. <u>Tidak menyalahgunakan fungsi jalan</u>	1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi dan Indikator Pendidikan Lalu Lintas
		dan badan jalan g. <u>Menerapkan etika berlalu lintas</u> h. <u>hemat dalam perjalanan</u> i. <u>Efektif dalam perjalanan</u> j. <u>mengutamakan rasa aman dan nyaman diri dan orang lain</u> 3. Mendeskripsikan pengertian, macam, dan tujuan hukum 4. Menjelaskan pentingnya hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 5. Mendeskripsikan aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 6. Menelaah aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 7. <u>Menjelaskan aturan hukum yang berlaku dalam upaya ketertiban dan kemanan lalu lintas.</u> 8. <u>Mempresentasikan hasil telaah tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk aturan hukum dalam berlalu lintas.</u>	f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menaati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas. c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain. e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi dan Indikator Pendidikan Lalu Lintas
			c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. a. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi dan Indikator Pendidikan Lalu Lintas
4	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa. 2.4 Menghargai sikap toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. 3.4 Memahami perbedaan baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 4.4 Menyaji sikap, tutur kata, dan perilaku yang baik, sesuai dengan nilai dan moral Pancasila dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat, bangsa dan negara. 4.7 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender.	1. Menyukuri bahwa negara Indonesia telah berhasil merumuskan Pancasila sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari 2. Memperlihatkan perilaku yang menggambarkan perilaku positif (senyum, sapa, salam) 3. Menyebutkan perilaku baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap 4. Menjelaskan perbedaan baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 5. Mendeskripsikan pentingnya bertutur kata, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 6. Menuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai dan moral Pancasila, 7. <u>Menuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan peraturan lalu lintas, seperti:</u> a. <u>melengkapi pengamanan diri dalam berlalu lintas,</u> b. <u>menerapkan etika berlalu lintas,</u> c. <u>efektif dalam perjalanan,</u> d. <u>mengutamakan rasa aman dan nyaman di jalan,</u> e. <u>bermasyarakat dengan OSIS tentang pengaturan tempat parkir di sekolah.</u> 8. Mempresentasikan contoh sikap, tutur	1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menaati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas. c. menerapkan norma dan moral

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi dan Indikator Pendidikan Lalu Lintas
		kata, dan perilaku yang baik, sesuai dengan nilai dan moral Pancasila dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat, bangsa dan negara.	etika berlalu lintas secara baik dan benar. d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain. e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi dan Indikator Pendidikan Lalu Lintas
			memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.
5	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada TuhanYME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa 2.5 Menghargai semangat dan komitmen sumpah pemuda sebagai perekat kebangsaan sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pemuda pada saat mendeklarasikan Sumpah Pemuda tahun 1928. 2.6 Menghayati semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. 3.5 Memahami masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya. 4.5 Menalar penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. 4.7 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan meng-hargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender. 4.8 Menyaji bentuk-bentuk partisipasi dan tanggung	1. Menyukuri bahwa bangsa Indonesia memiliki komitmen nasional yang dituangkan dalam Sumpah Pemuda untuk mengatasi masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya 2. Menyatakan bahwa masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat harus disikapi dan dihadapi dengan bijak dan sabar. 3. Membenarkan bahwa masalah masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat harus disikapi dan dihadapi dengan berlandaskan kepada semangat dan komitmen Sumpah pemuda sebagai perekat kebangsaan serta komitmen persatuan dan kesatuan nasional sebagai landasan untuk memecahkan masalah dalam kerangka NKRI. 4. Mendeskripsikan masalah yang muncul di masyarakat secara umum	1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menaati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi dan Indikator Pendidikan Lalu Lintas
	jawab warga-negaraa yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.	5. <u>Mendesripsikan masalah yang muncul di masyarakat berkaitan dengan lalu lintas sebagai berikut:</u> <u>Kecelakaan tragis akibat pelanggaran terhadap peraturan/kebijakan lalu lintas.</u> <u>Kurangnya pengawasan terhadap petugas pelaksana kebijakan lalu lintas.</u> <u>Penyuapan terhadap petugas lalu lintas</u> <u>Pelajar belum memenuhi syarat menggunakan kendaraan bermotor</u> 6. <u>Membuat variasi penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat.</u> 7. <u>Menyaji bentuk-bentuk partisipasi dan tanggung jawab kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional, termasuk komitmen terhadap tertib berlalu lintas.</u>	Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 2. Sosiologi: - Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan - Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selalin kegiatan berlalu lintas. - menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. - Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain. - Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: - Menunjukan sikap perilaku hemat dalam perjalanan - Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. - Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: - Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman - Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. - Menampilkan sikap perilaku

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi dan Indikator Pendidikan Lalu Lintas
			lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.

BAB III

MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS KE DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMP KELAS IX

A. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Materi Pembelajaran

Kompetensi Inti:

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
1	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam	1. Mensyukuri proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang diberkahi Allah SWT. 2. Meyakini kebenaran	1. Pancasila sebagai dasar negara 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 3. Ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai	1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas	Kita wajib bersyukur bahwa proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 telah diberkahi Allah SWT. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan social. Pancasila sebagai dasar negara

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
	kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa 2.1 Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Pacasila sesuai dengan dinamika perkembangan jaman 2.2 Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 3.1 Memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar	Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 3. Mendeskripsikan ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara 4. Mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman 5. Menelaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai perkembangan jaman 6. Menuliskan contoh pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam menerapkan peraturan lalu lintas baik ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi dan politik seperti menaati rambu-rambu lalu lintas, menghormati pengguna jalan,	dasar negara 4. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan jaman. 5. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman. 6. Contoh pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam menerapkan peraturan lalu lintas baik ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi dan politik seperti menaati rambu-rambu lalu lintas, menghormati pengguna jalan,	d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.	artinya bahwa Pacasila menjadi landasan dan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian maka seluruh peraturan perundangan di Indonesia harus berpedoman atau mengacu kepada Pancasila. Selain itu Pancasila juga menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan perundang-undangan dan pengawasan serta evaluasi. Penyelenggaraan dan pengelolaan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sebaliknya harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain sebagai dasar negara Pancasila juga merupakan pandangan hidup (<i>way of life</i>) bangsa Indonesia karena telah diyakini kebenaran dan kebaikannya. Artinya bahwa Pancasila menjadi dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandangi dan menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan jaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka sampai saat ini. Oleh karena itu Sudah selayaknya kita meyakini kebenaran Pancasila tersebut, walaupun dalam sejarah perkembangan-nya terdapat berbagai ancaman dan usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara, namun Pancasila tetap kokoh berkedudukan sebagai dasar negara.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
	negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman	psikologi dan politik seperti <u>menaati rambu-rambu lalu lintas</u> , <u>menghormati pengguna jalan</u> , <u>efektif dalam dalam perjalanan</u> , <u>mengutamakan rasa aman</u> (menggunakan <u>sabuk pengaman</u>), <u>dan nyaman</u> (tidak <u>saling menyerobot</u>), <u>membuat pengaturan tempat parkir di sekolah</u> secara <u>musyawarah</u> untuk <u>kepentingan bersama warga sekolah</u> .	efektif dalam <u>dalam perjalanan</u> , <u>mengutamakan rasa aman</u> , dan <u>nyaman</u> , <u>membuat pengaturan tempat parkir di sekolah</u> secara <u>musyawarah</u> untuk <u>kepentingan bersama warga sekolah</u> .	2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas. c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain. e. Memberi kesempatan bagi penyeberang	Nilai-nilai Pancasila tersebut dalam implementasinya disesuaikan dengan dinamika perkembangan jaman dan dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai contoh dalam penerapan peraturan lalu lintas. Ditinjau dari dimensi hukum setiap individu wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas seperti ketika lampu lalu lintas merah maka pengendara kendaraan harus berhenti, menyeberang pada zebra cross, tanda marka jalan tidak terputus-putus maka dilarang menyalip dan lain sebagainya. Ditinjau dari dimensi sosiologi, bahwa setiap individu hendaknya menerapkan etika berlalu lintas seperti ketika mau belok atau menyalip harus menyalakan lampu sen, memberi kesempatan pengendara lain yang akan mendahului/menyalip, tidak menggunakan jalan untuk berdagang, dan lain sebagainya. Ditinjau dari dimensi ekonomi, bahwa setiap individu hendaknya mengembangkan sikap hemat dan efektif dalam perjalanan, seperti dengan tertib dan mematuhi aturan maka akan memperlancar arus lalu lintas. Demikian halnya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan diri seperti memakai helm, mengenakan sabuk pengaman, membawa SIM dan STNK. Dengan demikian maka secara psikologis setiap individu merasa nyaman dalam berlalu lintas. Selanjutnya tinjauan dari dimensi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
		<u>menghormati guru dan teman,</u> <u>menjaga keamanan dan kenyamanan kelas dan lingkungannya.</u> 8. <u>Mempresentasikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman termasuk nilai-nilai positif dalam berlatu lintas.</u>		jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih meng-	<u>politik, bahwa setiap individu hendaknya melaksanakan kebijakan/aturan lalu lintas berdasarkan kebenaran</u>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
				tamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil.	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
2	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa 2.4 Menghargai sikap toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia 2.6 Menghayati	1. Bersyukur bahwa bangsa Indonesia memiliki rumusan pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 2. Menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai derajat yang sama walaupun berbeda agama, suku, budaya, adat istiadat, dan ras 3. Membenarkan adanya perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, dan ras. 4. Menyatakan makna	1. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Arti penting pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4. UU RI NO. 22 tahun 2009	d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.	<u>Seluruh manusia di dunia memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan YME walaupun terdapat perbedaan dalam agama, suku, budaya, adat istiadat, dan ras (kesetaraan).</u> Demikian halnya bangsa Indonesia yang berbhinneka. Kebhinnekaan tersebut tidak dijadikan sebagai alasan untuk terpecah belah atau bertindak diskriminatif. Sebaliknya perbedaan tersebut harus disikapi sebagai kekayaan yang beragam dan diperlukan suatu ikatan untuk mempersatukannya. Salah satu alat untuk mempersatukannya adalah melalui persamaan dasar/landasan hukum negara Indonesia, yaitu UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya diundangkan melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946. Penjelasan UUD menjadi bagian tak terpisahkan dari UUD 1945 secara

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
	semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI 3.2 Memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.2 Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. 5. Mendeskripsikan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 6. Menelaah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 7. <u>Menyebutkan UU RI NO. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</u> sebagai implementasi dari <u>pokok pikiran Pembukaan UUD negara RI tahun 1945.</u> 8. Mempresentasikan hasil telaah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam	tentang <u>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</u>	Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu kegiatan berlalu	keseluruhan, sehingga UUD 1945 terdiri atas, pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. Sesuai dengan dinamika perubahan jaman dan tuntutan reformasi, maka UUD Negara RI mengalami perubahan yaitu dengan cara amandemen. Proses amandemen dilaksanakan selama 4 tahun mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Dengan demikian sejak tahun 2002 negara Indonesia sudah menerapkan UUD Negera RI yang sudah diamandemen. Terdapat berbagai perubahan bab, pasal, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Namun Pembukaan UUD negara RI tahun 1945 tetap dipertahankan, karena di dalam Pembukaan terdapat Dasar Negara dan nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah diterima oleh seluruh bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Sedangkan sistematisasinya mengalami perubahan, yaitu terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 (empat) alinea, dan dalam Pembukaan tersebut terdapat pokok-pokok pikiran yaitu pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kerakyatan yang didasarkan kepada Ketuhanan YME dan kemanusiaan yang adil dan beradab. <u>Pokok-pokok pikiran tersebut harus dipahami secara benar sehingga dapat diterapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai kehidupan. Misalnya dalam menggunakan jalan/berlalu</u>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
		Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		lintas. c. menerapkan norma dan moral etika berlaku lintas secara baik dan benar. d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain. e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi:	lintas, hendaknya setiap individu senantiasa mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian hanya terdapat satu peraturan tentang lalu lintas yang mengatur seluruh warga negara Indonesia (pokok pikiran persatuan). Peraturan tersebut disusun secara musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak dan ditetapkan untuk mengatur kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan sekelompok orang (pokok pikiran kerakyatan). Dalam pelaksanaan-nyapun harus dilakukan oleh setiap orang tanpa pandang bulu artinya siapapun tanpa kecuali pejabat atau rakyat biasa semuanya diperlakukan sama, dan apabila terjadi pelanggaran akan ditindak serta dikenakan sanksi sesuai aturan (pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab). Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dari keterlaksanaan aturan yang telah ditetapkan. Tujuan dari peraturan tersebut tiada lain untuk mewujudkan keadilan, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial).

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
				a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
				menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.	
3	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME	1. Menyukuri bahwa negara Indonesia telah memiliki hukum yang mengatur kehidupan	1. <u>Perilaku taat terhadap hukum, antara lain menaati rambu-rambu lalu lintas., menghormati</u>	1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat	<u>Kita harus bersyukur bahwa negara Indonesia telah berhasil merumuskan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai bentuk rasa syukur tersebut, maka kita harus mentaati hukum yang berlaku</u>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
	dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa 2.3 Menghargai hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai wahana perwujudan keadilan dan kedamaian 3.3 Memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 4.3 Menyaji hasil telaah tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 2. Membenarkan perilaku taat terhadap hukum, sebagai berikut: a. <u>menaati rambu-rambu lalu lintas</u>. b. <u>Menati marka jalan lalu lintas</u>. c. <u>Menaati isyarat pengaturan lalu lintas</u>. d. <u>Melengkapi pengamanan diri dalam berlalu lintas</u>. e. <u>menghormati pengguna jalan</u>. f. <u>Tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan</u>. g. <u>Menerapkan etika berlalu lintas</u>. h. <u>hemat dalam perjalanan</u>. i. <u>Efektif dalam perjalanan</u>. j. <u>mengutamakan rasa aman dan</u>	<u>pengguna jalan</u>, <u>hemat dalam perjalanan</u>, dan <u>mengutamakan rasa aman</u> 2. Hakekat hukum (pengertian, macam, tujuan) 3. Arti penting hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 4. Hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 5. <u>UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan</u>.	pengatur lalu lintas d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain	(disiplin). <u>Contoh sikap dan perilaku menaati hukum adalah sebagai berikut:</u> 1. Masuk sekolah tepat waktu 2. Menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan 3. Tidak merusak fasilitas umum 4. Membayar pajak sesuai ketentuan 5. Menaati rambu-rambu lalu lintas, seperti <u>menveberang di zebra cross</u>, <u>tidak melanggar marka jalan</u>, <u>pada saat lampu lalu lintas merah harus berhenti</u>, dan <u>sebagainya</u>. 6. <u>menghormati pengguna jalan</u>, seperti jika akan <u>menyalib</u> <u>memberikan tanda</u>, <u>tidak menghalangi jalan kendaraan lain</u> (posisi tidak sesuai tanda marka jalan) 7. <u>mengutamakan rasa aman</u>, seperti <u>melengkapi pengamanan diri</u> (sabuk pengaman, helm, membawa SIM, STNK), <u>tidak menyalakan kendaraan dengan kecepatan tinggi (kebut-kebutan)</u> Hukum merupakan serangkaian aturan-aturan yang berisi perintah dan larangan, bersifat memaksa dan mengikat (berlaku bagi orang/masyarakat dalam wilayah tertentu), dibuat oleh pemerintah (penguasa negara) untuk melindungi kepentingan warganya dalam pergaulan hidup di masyarakat, apabila melanggar maka akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Hukum memiliki sifat memaksa dan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
		<u>nyaman diri dan orang lain</u> 3. <u>Membenarkan perilaku taat terhadap hukum, antara lain menaati rambu-rambu lalu lintas, menghormati pengguna jalan, hemat dalam perjalanan, dan mengutamakan rasa aman</u> 4. Mendeskripsikan pengertian, macam, dan tujuan hukum 5. Menjelaskan pentingnya hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 6. Mendeskripsikan aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 7. Menelaah aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara		untuk kegiatan lalu lintas. 2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama b. Menggunakan jalan c. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selalin kegiatan berlalu lintas. d. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. e. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain. f. Memberi kesempatan	mengatur. Oleh karena itu, demi hukum maka dapat memaksa seseorang untuk menaati peraturan yang berlaku di dalam masyarakat, jika terjadi pelanggaran dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. <u>Orang yang tidak taat terhadap ketentuan hukum berarti orang tersebut melakukan tindakan melawan/melanggar hukum. Dengan kata lain orang tersebut tidak disiplin.</u> Apabila dalam masyarakat tidak terdapat peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, maka kehidupan masyarakat tidak tertib dan akan timbul kekacauan. Demikian halnya dalam berlalu lintas, jika tidak diatur maka akan terjadi kekacauan di jalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, kemacetan, keributan, dan lain sebagainya. <u>Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua menaati peraturan yang berlaku di masyarakat termasuk menaati peraturan lalu lintas agar terwujud kehidupan yang tertib, aman dan sejahtera.</u> Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal itu tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD negara RI tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hakikat hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban di masyarakat dan bagi pelanggaran diberikan sanksi yang tegas

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
		8. <u>Menjelaskan aturan hukum yang berlaku dalam upaya ketertiban dan kemandirian lalu lintas.</u> 9. <u>Mempresentasikan hasil telaah tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk aturan hukum dalam berlalu lintas.</u>		bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan	dan nyata. Selain itu hukum dibuat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan hidup antara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Hukum terbagi menjadi beberapa macam, terdapat hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Terdapat hukum publik dan hukum privat. Terdapat hukum secara formal dan material. Walaupun terdapat macam-macam hukum, pada prinsipnya tujuan akhir dari hukum adalah mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Hukum sangat penting bagi masyarakat karena dapat memberikan perlindungan dan keadilan terhadap warga negaranya. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan. <u>UU tersebut mengatur Tata Cara Berlalu Lintas yang bertujuan untuk meniaga Ketertiban, keamanan, dan Keselamatan masyarakat. Pasal-pasal yang sangat penting dipahami antara lain sebagai berikut:</u> <u>Pasal 77 (1)</u> <u>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis</u>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
				sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu	<u>Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.</u> <u>Pasal 106 (5)</u> <u>Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:</u> a. <u>Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;</u> b. <u>Surat Izin Mengemudi;</u> c. <u>bukti lulus uji berkala; dan/atau</u> d. <u>tanda bukti lain yang sah.</u> <u>Pasal 288 (2)</u> <u>-tidak dilengkapi SIM</u> <u>-pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan, denda paling banyak Rp.250.000.</u> <u>Pasal 105:</u> <u>Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:</u> a. <u>berperilaku tertib; dan/atau</u> b. <u>mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.</u> <u>Pasal 106 (1)</u> <u>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.</u>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
				lintas secara adil. d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.	Pasal 103 (3) <u>Dalam hal terjadi kondisi kemacetan Lalu Lintas yang tidak memungkinkan gerak Kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan.</u> Pasal 106 (2) <u>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.</u> <u>Berdasarkan perundangan itulah menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sungguh-sungguh ingin melindungi warganegaranya ketika melakukan perjalanan.</u>
4	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa 2.4 Menghargai	1. Mensyukuri bahwa negara Indonesia telah berhasil merumuskan Pancasila sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari 2. Memperlihatkan perilaku yang menggambarkan perilaku positif	1. Perbedaan baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 2. Arti penting bertutur kata, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas	Kita wajib bersyukur bahwa negara Indonesia telah berhasil merumuskan Pancasila sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pedoman untuk menentukan baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap serta bertindak. Baik dan buruk adalah dua kata yang berlawanan, baik dalam bergaul, bertutur kata, berperilaku, maupun bersikap. Ukuran baik dan buruk ditentukan oleh suatu ukuran dalam kehidupan masyarakat. Baik secara umum/universal belum tentu

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
	sikap toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia 3.4 Memahami perbedaan baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 4.4 Menyaji sikap, tutur kata, dan perilaku yang baik, sesuai dengan nilai dan moral Pancasila dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat, bangsa dan negara	(senyum, sapa, salam) 3. Menyebutkan perilaku baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap 4. Menjelaskan perbedaan baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 5. Mendeskripsikan pentingnya bertutur kata, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 6. Menuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai dan moral Pancasila 7. Menuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan peraturan lalu lintas seperti: a. <u>melengkapi</u>	3. <u>Contoh perilaku yang sesuai dengan peraturan lalu lintas, seperti melengkapi pengamanan diri dalam berlalu lintas, menerapkan etika berlalu lintas, efektif dalam perjalanan, mengutamakan rasa aman dan nyaman di jalan, bermusyawarah dengan OSIS tentang pengaturan tempat parkir di sekolah.</u> 4. Pengembangan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender	e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. g. Menaati perkapolri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menati perkapolri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama	dikatakan baik dalam masyarakat tertentu, oleh karena itu ukurannya adalah masyarakat yang menggunakannya. Namun terdapat pula kategori baik yang secara umum/universal diakui kebenarannya, seperti perilaku/sikap jika bertemu dengan seseorang tersenyum dan menyapa. Bertutur kata, berperilaku, dan bersikap baik sangat penting dikembangkan, karena dengan melakukan hal itu kita akan dapat bergaul dengan siapapun secara baik. Selain itu juga menghindari pertengkaran atau perkelahian, termasuk dalam menyelesaikan masalah juga perlu diselesaikan dengan tutur kata, perilaku dan sikap yang baik pula. Tindakan baik dan buruk untuk negara Indonesia berlandaskan pada hukum agama maupun negara. Hukum agama mengacu kepada kitab suci dan hukum negara mengacu kepada Pancasila sebagai landasan ideologi. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Dalam implementasinya Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam menilai suatu sikap dan perilaku baik dan buruk. Dikatakan sikap dan perilaku baik apabila sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan dikatakan buruk apabila bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
	4.7 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender	<u>pengamanan diri dalam berlalu lintas.</u> b. <u>menerapkan etika berlalu lintas.</u> c. <u>efektif dalam perjalanan.</u> d. <u>mengutamakan rasa aman dan nyaman di jalan.</u> e. <u>bermusyawarah dengan OSIS tentang pengaturan tempat parkir di sekolah.</u> 8. Mempresentasikan contoh sikap, tutur kata, dan perilaku yang baik, sesuai dengan nilai dan moral Pancasila dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat, bangsa dan negara		pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selalin kegiatan berlalu lintas. c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain. e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam	<u>Berkaitan dengan perilaku yang baik dalam berlalu lintas, maka setiap individu hendaknya mengembangkan sikap tertib lalu lintas dengan melengkapi pengamanan diri dalam berlalu lintas seperti menggunakan helm, mengenakan sabuk pengaman; , menerapkan etika berlalu lintas seperti menghormati sesama pengguna jalan dengan memberikan tanda tertentu jika akan menyalip, belok, atau berhenti; menghormati pejalan kaki dengan memberi kesempatan untuk menyeberang; bermusyawarah dengan OSIS tentang pengaturan tempat parkir di sekolah. Dengan menerapkan berbagai aturan tersebut maka ketika berkendara akan terasa aman dan nyaman.</u> <u>Dengan menerapkan berbagai sikap dan perilaku tersebut maka akan terdapat dari kondisi yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu sebagai warga negara sekaligus sebagai masyarakat hendaknya selalu menghindari perilaku tidak tertib dalam berlalu lintas.</u> Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan budaya, maka bertutur kata, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila akan menciptakan suasana yang damai dan nyaman dalam berbagai hal, termasuk

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
				perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan	dalam berlalu lintas. Artinya ketika menggunakan jalan akan muncul rasa persatuan dengan cara saling menghormati pengguna jalan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
				sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
5	1.1 Menghayati perilaku beriman dan ber-taqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa 2.5 Menghargai semangat dan komitmen sumpah pemuda sebagai perekat kebangsaan sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pemuda pada saat mendeklarasikan Sumpah Pemuda tahun 1928	1. Mensyukuri bahwa bangsa Indonesia memiliki komitmen nasional yang dituangkan dalam Sumpah Pemuda untuk mengatasi masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya 2. Menyatakan bahwa masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya 3. Membenarkan bahwa masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat harus dihadapi dengan bijak dan sabar.	1. Masalah-masalah yang muncul di masyarakat antara lain sebagai berikut: - Tawuran - Penggunaan narkoba - Kebijakan tidak didasarkan pada kepentingan umum/ bersama - Diskriminatif dalam memberikan layanan - Korupsi (Penyuapan, penggelapan, pencucian uang dll) - Penipuan terhadap pihak lain dengan berbagai cara 2. <u>Masalah-masalah yang muncul di masyarakat</u>	keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas. 1. Hukum: - Menaati rambu-rambu lalu lintas - Menaati marka jalan lalu lintas - Menaati isyarat pengatur lalu lintas - Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas - Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. - Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. - Menaati perkap	Kita wajib bersyukur bahwa bangsa Indonesia memiliki komitmen nasional yang dituangkan dalam Sumpah Pemuda untuk mengatasi masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya. Terdapat berbagai masalah yang muncul dalam proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, antara lain sebagai berikut: - Korupsi (Penyuapan, penggelapan, pencucian uang) - Tawuran - Pemakaian narkoba - Kebijakan tidak didasarkan pada kepentingan umum/bersama - Diskriminatif dalam memberikan layanan - Penipuan terhadap pihak lain dengan berbagai cara Solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang telah dipaparkan di atas hendaknya berpedoman kepada semangat dan komitmen Sumpah pemuda serta komitmen persatuan dan kesatuan nasional sebagai landasan untuk memecahkan masalah dalam kerangka NKRI. Artinya, dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat tersebut, hendaknya mengedepankan persatuan,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
	2.6 Menghayati semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI 3.5 Memahami masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya 4.5 Menalar penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat 4.7 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman	kepada semangat dan komitmen Sumpah pemuda sebagai perekat kebangsaan serta komitmen persatuan dan kesatuan nasional sebagai landasan untuk memecahkan masalah dalam kerangka NKRI. 4. Mendeskripsikan masalah yang muncul di masyarakat secara umum 5. Mendeskripsikan masalah yang muncul di masyarakat berkaitan dengan lalu lintas sebagai berikut: a. Kecelakaan tragis akibat pelanggaran terhadap peraturan/kebiasaan lalu lintas. b. Kurangnya pengawasan terhadap petugas	berkaitan dengan lalu lintas seperti pelanggaran terhadap kebijakan lalu lintas dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara tegas pilih dan atau dengan imbalan. 3. Sumpah Pemuda serta komitmen persatuan dan kesatuan nasional sebagai landasan untuk memecahkan masalah dalam kerangka NKRI. 4. Berbagai solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah termasuk masalah lalu lintas.	Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menati perkapolri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selanjutnya kegiatan berlalu lintas. c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan	tanpa membedakan agama, suku, ras, dan golongan. Selain itu masalah yang muncul hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah dari berbagai pihak sehingga menghasilkan suatu keputusan atau solusi yang tepat untuk masyarakat Indonesia yang beragam. Adapun masalah masalah yang berkaitan dengan lalu lintas yang muncul di masyarakat antara lain sebagai berikut: 1. Kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut: a. pengemudi dibawah umur (belum memiliki SIM) b. pengemudi dalam kondisi ngantuk atau mabuk c. pengemudi tidak menaati aturan lalu lintas 2. Penyuaian terhadap petugas lalu lintas 3. Kemacetan di berbagai tempat Beberapa Solusi untuk mengatasi masalah yang telah disebutkan di atas, antara lain dengan cara sebagai berikut: 1. Penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas tanpa pandang bulu, siapapun yang melakukan pelanggaran harus dikenakan sanksi sesuai hukum/aturan yang berlaku (disiplin). 2. Pembuatan kebijakan/aturan dengan mengikutsertakan berbagai pihak termasuk masyarakat, aturan tersebut disosialisasikan sebelum diberlakukan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
	suku, agama, ras, budaya, dan gender 4.8 Menyaji bentuk-bentuk partisipasi dan tanggung jawab warga-negera yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional	<u>pelaksana kebijakan lalu lintas.</u> c. <u>Penyuapan terhadap petugas lalu lintas</u> d. <u>Pelajar belum memenuhi syarat menggunakan kendaraan bermotor</u> 6. <u>Membuat variasi penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat.</u> 7. <u>Menyaji bentuk-bentuk partisipasi dan tanggung jawab kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional, termasuk komitmen terhadap tertib berlalu lintas.</u>		benar. d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain. e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih	untuk mendapatkan masukan yang dapat digunakan sebagai perbaikan. 3. Kesamaan layanan seluruh institusi/ lembaga baik pemerintah maupun swasta kepada masyarakat. 4. Waspada terhadap berbagai bentuk informasi dan orang-orang yang tidak dikenal. <u>Adapun solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan lalu lintas adalah dengan cara:</u> 1. <u>Tertib berlalu lintas dan beretika ketika menggunakan jalan.</u> 2. <u>Pembinaan terhadap petugas</u> 3. <u>Melaporkan tindakan petugas yang tidak benar.</u>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
				mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain.	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi dan Indikator	Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
				b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.	

B. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Silabus

Kompetensi Inti:

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antar bangsa 2.1 Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila	1. Menyukuri proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang diberkahi Allah SWT. 2. Meyakini kebenaran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 3. Mendeskripsikan ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara 4. Mendeskripsikan dinamika nilai-nilai	1. Pancasila sebagai dasar negara 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 3. Ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara 4. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan	Mengamati - Membaca berita/artikel tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup - Menyimak dari berbagai sumber tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Menanya - Mengidentifikasi	Sikap: - Observasi perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran, serta komitmen kewarganegaraan (ikrar) Pengetahuan - Tes digunakan	12 JP (4x3JP)	1. Budi, Agung, 2010. <i>Pedoman Pembelajaran Pendidikan Keselamatan Berjalan Lintas</i>. Bandung. Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar. 2. Fajar,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dengan dinamika perkembangan jaman 2.2 Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 3.1 Memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan	Pancasila sesuai perkembangan jaman 5. Menelaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman 6. Menuliskan contoh pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam penerapan peraturan lalu lintas baik ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi dan politik. seperti menaati rambu-rambu lalu lintas, menghormati pengguna jalan, efektif dalam perjalanan.	jaman. 5. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman dalam berbagai kehidupan 6. Contoh pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam menerapkan peraturan lalu lintas baik ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi dan politik. seperti menaati rambu-rambu lalu lintas, menghormati pengguna jalan, efektif dalam perjalanan.	pertanyaan tentang ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara - Mengajukan pertanyaan tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan jaman. - Mengidentifikasi pertanyaan tentang nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman berkaitan dengan sikap dan perilaku berlalu lintas - Mengumpulkan pertanyaan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman dalam berbagai kehidupan Mengumpulkan Informasi - Mencari informasi dari berbagai sumber tentang ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai	untuk menilai hasil belajar secara individu tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Keterampilan Menyajikan hasil telaah pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang Dinamika Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa		Arnie, dkk, 2014, <i>Kemdikbud Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)</i> Berdasar-kan Kurikulum SMP/MTs Kelas IX 3. Farouk Muhamma d, 1998. <i>Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas</i>, PTIK Press, Jakarta. 4. <i>Kemdikbud</i>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	angan jaman	7. <u>Menunjukkan perilaku disiplin, seperti tidak terlambat masuk sekolah/kelas, mengerjakan tugas yang diberikan guru, menyerahkan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai peraturan sekolah, menghormati guru dan teman, menjaga keamanan dan kenyamanan kelas dan lingkungannya.</u> 8. <u>Mempresentasikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman termasuk nilai-nilai positif dalam berlalu lintas.</u>	<u>mengutamakan rasa aman, dan nyaman, membuat pengaturan tempat parkir di sekolah secara musyawarah untuk kepentingan bersama warga sekolah.</u>	dasar negara • Mengumpulkan sumber data berkaitan dengan arti penting dan perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman dalam berbagai kehidupan • Mengumpulkan data tentang perilaku sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman. • <u>Mengumpulkan data tentang perilaku tertib berlalu lintas sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman.</u> • <u>Mengumpulkan data tentang perilaku sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman.</u> Menalar/ Mengasosiasi • Menyimpulkan arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup			2013, <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas IX</i>, Jakarta 5. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik, 2008 <i>Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs, Kelas IX Edisi 4</i> Jakarta: Depdiknas. 6. Referensi atau Internet sesuai materi pokok 7. Sekjen dan Kepaniteraan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				bangsa - Menentukan hubungan antara mewujudkan nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan jaman saat ini dan dimasa yang akan datang <u>Menvimpulkan arti penting perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman dalam penerapan peraturan lalu lintas.</u> Mengomunikasikan - Menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa - Menyusun laporan dan mempresentasikan perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan			Mahkamah Konstitusi RI, 2009, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs.</i> Jakarta 8. UU RI Nomor 22 tahun 2009 <i>tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</i> 9. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				jamin • <u>Menyusun laporan dan mempresentasikan perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman dalam penerapan peraturan lalu lintas.</u> • Membuat dan membacakan ikrar/ komitmen untuk mempertahankan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dinamika perkembangan jaman			
2	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan lingkungan pergaulan antar bangsa 2.4 Menghargai	1. Bersyukur bahwa bangsa Indonesia memiliki rumusan pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 2. Menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai derajat yang sama walaupun berbeda agama, suku, budaya, adat istiadat,	1. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Arti penting pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik	Mengamati • Membaca Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Mengamati dari video/film/gambar tentang makna pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia	Sikap: • Observasi perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran • Pengetahuan Tes digunakan untuk	6 JP (2x3JP)	1. Budi, Agung, 2010. <i>Pedoman Pembelajaran dan Pendidikan Keselamatan Berjalan Lintas</i>. Bandung. Direktorat Lalu Lintas

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	sikap toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia 2.6 Menghayati semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI 3.2 Memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.2 Menyaji hasil telaah pokok-pokok	dan ras (kesetaraan). 3. Membenarkan adanya perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, dan ras. 4. Menyatakan makna persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. 5. Mendeskripsikan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 6. Menelaah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 7. Mendeskripsikan UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai implementasi dari pokok pikiran Pembukaan UUD negara RI tahun 1945. 8. Mempresentasikan hasil telaah pokok-pokok pikiran yang	Indonesia Tahun 1945 3. Sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4. <u>UU RI NO. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</u>	Tahun 1945 - Membaca informasi dari berbagai sumber tentang makna <u>UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</u> sebagai implementasi dari pokok pikiran <u>Pembukaan UUD negara RI tahun 1945</u>. Menanya - Mengidentifikasi pertanyaan tentang pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Mengajukan pertanyaan tentang arti penting pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Mengidentifikasi pertanyaan tentang makna <u>UU RI No. 22 tahun 2009 tentang</u>	menilai hasil belajar secara individu tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Keterampilan Portofolio menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik		Polda Jabar. 2. Fajar, Arnie, dll, 2014, Kemdikbud Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasar Kurikulum 2013 SMP/MTs Kelas IX 3. Farouk Muhammad, 1998. <i>Penegakan Hukum dalam Bidang Lalu Lintas</i>,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	terkandung dalam Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		<u>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</u> sebagai implementasi dari pokok pikiran <u>Pembukaan UUD negara RI tahun 1945</u>. Mengumpulkan Informasi • Mencari informasi dari berbagai sumber tentang pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Menentukan sumber data dan mendiskusikan tentang arti penting pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Mendiskusikan tentang arti penting UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai	Indonesia Tahun 1945		PTIK Press, Jakarta. 4. Kemdikbud, 2013, <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas IX</i>, Jakarta 5. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik, 2008 <i>Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs, Kelas IX Edisi 4</i> Jakarta: Depdiknas 6. Referensi atau Internet sesuai materi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				<u>implementasi dari pokok pikiran Pembukaan UUD negara RI tahun 1945.</u> Menalar/ Mengasosiasi - Menyimpulkan makna pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 - Menentukan hubungan setiap pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Menyimpulkan tentang arti penting UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai <u>implementasi dari pokok pikiran Pembukaan UUD negara RI tahun 1945.</u>			pokok dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs.</i> Jakarta 8. UU RI Nomor 22 tahun 2009 <i>tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</i> 9. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				Mengomunikasikan - Menyusun paparan dan mempresentasikan secara kelompok tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUDNegara Republik Indonesia dan - Menentukan sikap positif terhadap <u>UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</u> sebagai implementasi dari <u>pokok pikiran Pembukaan UUD negara RI tahun 1945.</u> - Menerapkan sikap positif terhadap Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari			
3	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa	1. Menyukuri bahwa negara Indonesia telah memiliki hukum yang mengatur kehidupan	1. Hakekat hukum (pengertian, macam, tujuan) 2. <u>Perilaku taat</u>	Mengamati Membaca berbagai sumber pengertian, ciri dan macam-	Sikap: Perilaku dan sikap peserta	12 JP (4x3JP)	1. Budi, Agung, 2010. <i>Pedoman</i>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antar bangsa 2.3 Menghargai hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai wahana perwujudan keadilan dan kedamaian 3.3 Memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 4.3 Menyaji hasil telaah tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 2. Membenarkan perilaku taat terhadap hukum, sebagai berikut: a. <u>menaati rambu-rambu lalu lintas</u>, b. <u>Menati marka jalan lalu lintas</u>, c. <u>Menaati isyarat pengaturan lalu lintas</u> d. <u>Melengkapi pengamanan diri dalam berlalu lintas</u> e. <u>menghormati pengguna jalan</u>, f. <u>Tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan</u> g. <u>Menerapkan etika berlalu lintas</u> h. <u>hemat dalam perjalanan</u>, i. <u>Efektif dalam perjalanan</u> j. <u>mengutamakan rasa aman dan nyaman diri dan orang lain</u> 3. Mendeskripsikan pengertian, macam, dan tujuan hukum	terhadap hukum, antara lain <u>menaati rambu-rambu lalu lintas</u>, <u>menghormati pengguna jalan</u>, <u>hemat dalam perjalanan</u>, dan <u>mengutamakan rasa aman</u> 3. Arti penting hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 4. Hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 5. <u>UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan</u>.	macam hukum, serta membuat ringkasan secara individu • <u>Membaca aturan hukum yang berlaku dalam berlalu lintas</u> • <u>Mengamati perilaku teman sejawat tentang pelaksanaan kewajiban di lingkungan masyarakat</u> • <u>Mengamati dari video/film/gambar tentang perilaku penegakkan hukum di lingkungan masyarakat</u> • <u>Mengamati dari video/film/gambar tentang perilaku penegakkan hukum dalam berlalu lintas</u>. Menanya • Mengidentifikasi pertanyaan tentang Hakekat hukum (pengertian, macam, tujuan) • Mengajukan pertanyaan dengan menggunakan High	didik dalam proses pembelajaran n. Jurnal dan penilaian teman sejawat, untuk menilai ketaatan terhadap hukum yang berlaku Pengetahuan: • Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara		<i>Pembelajaran Pendidikan Keselamatan Berjalan Lintas.</i> Bandung. Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar. 2. Fajar, Arnie, dkk, 2014, Kemdikbud Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasar-kan Kurikulum 2013 SMP/MTs

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		4. Menjelaskan pentingnya hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 5. Mendeskripsikan aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 6. Menelaah aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 7. <u>Menjelaskan aturan hukum yang berlaku dalam upaya ketertiban dan kemanan lalu lintas.</u> 8. <u>Mempresentasikan hasil telaah tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk aturan hukum dalam berlalu lintas.</u>		Order Thinking Skills (HOTS) tentang Arti penting hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara • <u>Mengidentifikasi pertanyaan tentang Arti penting peraturan lalu lintas yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara</u> Mengumpulkan Informasi • Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Hakikat hukum (pengertian, macam, tujuan) • <u>Mencari informasi dan mengamati bentuk ketaatan hukum dalam berlalu lintas.</u> • Menentukan sumber data dan mendiskusikan Arti penting hukum yang berlaku dalam	Keterampilan: • Portofolio untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.		Kelas IX 3. Farouk Muhammad, 1998. <i>Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas</i>, PTIK Press, Jakarta. 4. Kemdikbud, 2013, <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas IX</i>, Jakarta 5. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik, 2008 <i>Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs, Kelas IX Edisi 4</i> Jakarta:

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				kehidupan bermasyarakat dan bernegara • <u>Menentukan sumber data dan mendiskusikan arti penting mentaati peraturan lalu lintas</u> • Menentukan jenis data yang berkaitan dengan bentuk ketaatan hukum, seperti tertib lalu lintas, anti korupsi, dan sebagainya. Menalar/ Mengasosiasi • Menyimpulkan tentang hakekat hukum yang berlaku dalam masyarakat dan negara • Menentukan hubungan antara arti penting hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dengan ketaatan terhadap hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara			Depdiknas 6. Referensi atau Internet sesuai materi pokok 7. Sekjen dan Kepanite- raan Mahkamah Konstitusi RI, 2009, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitu si untuk SMP dan MTs.</i> Jakarta 8. UU RI Nomor 22 tahun 2009 <i>tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</i> 9. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				• <u>Menyimpulkan arti penting peraturan berlalu lintas yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara</u> Mengomunikasikan • <u>Menyajikan hasil telaah tentang hukum termasuk hukum yang mengatur lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara</u> • <u>Menerapkan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</u> • <u>Menerapkan perilaku tertib berlalu lintas</u> • <u>Melaporkan hasil pengamatan perilaku tentang penegakkan hukum termasuk hukum dalam berlalu lintas di masyarakat</u> • <u>Mencoba</u>			

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
4	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antar bangsa 2.4 Menghargai sikap toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 3.4 Memahami Indonesia perbedaan	1. Mensyukuri bahwa negara Indonesia telah berhasil merumuskan Pancasila sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari 2. Memperlihatkan perilaku yang menggambarkan perilaku positif (senyum, sapa, salam) 3. Menyebutkan perilaku baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap 4. Menjelaskan perbedaan baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 5. Mendeskripsikan	1. Perbedaan baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 2. Arti penting bertutur kata, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 3. Bersikap, bertutur kata, dan berperilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan moral dalam perilaku lintas, seperti melengkapi pengamanan	berkomitmen untuk menegakkan hukum dalam perilaku lintas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengamati • Mengamati film atau gambar atau peristiwa tentang bertutur kata, berperilaku dan bersikap yang baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara • Mengamati film atau gambar atau peristiwa tentang bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai nilai Pancasila. Jurnal, untuk mencatat dan menilai pembiasaan bertutur kata, berperilaku, dan bersikap.	Sikap: • Penilaian teman sejawat dan Penilaian diri, untuk menilai bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai nilai Pancasila. Jurnal, untuk mencatat dan menilai pembiasaan bertutur kata, berperilaku, dan bersikap.	12 JP (4x3JP)	1. Budi, Agung, 2010. <i>Pedoman Pembelajaran Pendidikan Keselamatan Berjalan Lintas</i> . Bandung. Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar. 2. Fajar, Amie, dkk, 2014, <i>Kemendikbud Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas</i>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 4.4 Menyaji sikap, tutur kata, dan perilaku yang baik, sesuai dengan nilai dan moral Pancasila dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat, bangsa dan negara 4.7 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya,	pentingnya bertutur kata, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 6. Menuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai dan moral Pancasila, 7. Menuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan peraturan lalu lintas, seperti: a. <u>melengkapi pengamanan diri dalam berlalu lintas</u>, b. <u>menerapkan etika berlalu lintas</u>, c. <u>efektif dalam perjalanan</u>, d. <u>mengutamakan rasa aman dan nyaman di jalan</u>, e. <u>bermasyarakat dengan OSIS tentang pengaturan tempat parkir di sekolah</u>. 8. Mempresentasikan contoh sikap, tutur kata, dan perilaku yang baik, sesuai dengan nilai dan moral Pancasila dalam pergaulan hidup sehari-	diri dalam <u>berlalu lintas</u>, menerapkan <u>etika berlalu lintas</u>, <u>efektif dalam perjalanan</u>, <u>mengutamakan rasa aman dan nyaman di jalan</u>, <u>bermasyarakat dengan OSIS tentang pengaturan tempat parkir di sekolah</u>. 4. Bersikap, bertutur kata, dan berperilaku yang baik sesuai dengan nilai dan moral Pancasila.	<u>perilaku tertib berlalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</u> Menanya • Mengidentifikasi pertanyaan tentang perbedaan bertutur kata, berperilaku, dan bersikap yang baik dan buruk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila • Mengidentifikasi arti penting bertutur kata, berperilaku dan bersikap yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila • Mengidentifikasi pertanyaan tentang perbedaan bertutur kata, berperilaku, dan bersikap yang baik dan buruk dalam berlalu lintas Mengumpulkan Informasi • Mencari dari berbagai sumber belajar dan	Pengamatan, penilaian ini merupakan penilaian proses menilai perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran, serta simulasi Keterampilan: • Portofolio untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang contoh, ciri-ciri, dan perbedaan bertutur kata, berperilaku dan bersikap yang baik		pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMP/MTs. Kelas IX 3. Farouk Muhamma d, 1998. <i>Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas</i>, PTIK Press, Jakarta. 4. Kemdikbud, 2013, <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs</i>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	dan gender	hari di masyarakat, bangsa dan negara		<u>mendiskusikan ciri - ciri dan perbedaan bertutur kata, berperilaku, dan bersikap yang baik dan buruk serta berperilaku tertib berlalu lintas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila</u> • <u>Menentukan sumber data misal: mengumpulkan angket kepada teman/masyarakat tentang bertutur kata, berperilaku, dan bersikap yang baik dan buruk serta berperilaku tertib berlalu lintas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila</u> Menalar/ Mengasosiasi • <u>Menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh dan menyimpulkan tentang perbedaan baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku tertib</u>	dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara		Kelas IX, Jakarta 5. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik, 2008 <i>Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs, Kelas IX Edisi 4</i> Jakarta: Depdiknas 6. Referensi atau Internet sesuai materi pokok 7. Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi</i>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				<u>berlalu lintas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila</u> • <u>Menvimpulkan arti penting bertutur kata, berperilaku, dan bersikap yang baik serta berperilaku tertib berlalu lintas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila</u> Mengomunikasikan • Menyusun bahan presentasi dan mempresentasikan hasil telaah perbedaan baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, bersikap <u>serta berperilaku tertib berlalu lintas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila</u> • Mensimulasikan perbuatan tutur kata, perilaku, dan sikap yang baik <u>serta berperilaku tertib berlalu lintas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila</u> • Membiasakan			<i>usi untuk SMP dan MTs. Jakarta</i> 8. UU RI Nomor 22 tahun 2009 <i>tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</i> 9. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
5	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antar bangsa 2.5 Menghargai semangat dan komitmen sumpah pemuda sebagai perekat kebangsaan sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pemuda	1. Mensyukuri bahwa bangsa Indonesia memiliki komitmen nasional yang dituangkan dalam Sumpah Pemuda untuk mengatasi masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya 2. Menyatakan bahwa masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat harus disikapi dan dihadapi dengan bijak dan sabar. 3. Membenarkan bahwa masalah masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat harus disikapi dan dihadapi	1. Masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat seperti: a. Tawuran b. Penggunaan narkoba c. Kebijakan tidak didasarkan pada kepentingan umum/bersama d. Diskriminatif dalam memberikan layanan kesehatan e. Penipuan terhadap pihak lain	bertutur kata, berperilaku, dan bersikap yang baik serta berperilaku tertib berlatu lintas sesuai dengan nilai dan moral Pancasila dalam pergaulan hidup sehari-hari. Mengamati • Mengamati kasus masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar • Mengamati kasus masalah kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di lingkungan sekitar • Membaca dari berbagai sumber dan mendiskusikan tentang masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan masalah pelanggaran lalu lintas serta cara pemecahannya. Menanya • Mengidentifikasi pertanyaan tentang	Sikap: • Observasi Penilaian proses menilai perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran Pengetahuan: • Portofolio untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang masalah-masalah yang	12 JP (4x3JP)	1. Budi, Agung, 2010. <i>Pedoman Pembelajaran dan Pendidikan Keselamatan Berlatu Lintas</i> . Bandung. Direktorat LaluLintas Polda Jabar. 2. Fajar, Arnle, dll, 2014, <i>Kemdikbud Model Pengintegrasian Pendidikan Pendidikan Lintas</i>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	pada saat mendeklarasikan Sumpah Pemuda tahun 1928 2.6 Menghayati semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI 3.5 Memahami masalah-masalah yang muncul dalam keberagamaan masyarakat dan cara pemecahannya 4.5 Menalar penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagamaan masyarakat Berinteraksi dengan teman dan orang lain	dengan berlandaskan kepada semangat dan komitmen Sumpah Pemuda sebagai perekat kebangsaan serta komitmen persatuan dan kesatuan nasional sebagai landasan untuk memecahkan masalah dalam kerangka NKRI. 4. Mendeskripsikan masalah yang muncul di masyarakat secara umum 5. <u>Mendeskrripsikan masalah yang muncul di masyarakat berkaitan dengan lalu lintas, seperti pelanggaran terhadap kebijakan lalu lintas, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang muncu</u> 6. <u>Membuat variasi penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat</u> 7. <u>Menyaji bentuk-bentuk partisipasi dan</u>	dengan berbagai cara 2. <u>Masalah yang muncul di masyarakat berkaitan dengan lalu lintas seperti pelanggaran terhadap kebijakan lalu lintas dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara tebang pilih dan atau dengan imbalan.</u> 3. Sumpah Pemuda serta komitmen persatuan dan kesatuan nasional sebagai landasan untuk memecahkan masalah dalam kerangka NKRI. 4. <u>Berbagai solusi untuk</u>	masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat • <u>Mengidentifikasi pertanyaan tentang masalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat.</u> • <u>Mengajukan pertanyaan tentang berbagai masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya</u> • <u>Mengajukan pertanyaan tentang masalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat. dan cara pemecahannya</u> Mengumpulkan Informasi • Menentukan sumber data misal: wawancara, observasi dll tentang keberagaman masyarakat dan cara	muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya. Proyek untuk menilai proyek belajar kewarganegaraan		pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMP//M.Ts Kelas IX 3. Farouk Muhamma d, 1998. <i>Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas</i>, PTIK Press, Jakarta. 4. Kemdikbud, 2013, <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas IX</i>,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender 4.8 Menyaji bentuk-bentuk partisipasi dan tanggung jawab kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional	<u>tanggung jawab kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional, termasuk komitmen terhadap tertib berlalu lintas.</u>	<u>menyelesaikan berbagai masalah termasuk masalah lalu lintas</u>	pemecahannya - Menentukan sumber data misalnya wawancara, observasi dll. tentang pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat dan cara pemecahannya - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang masalah-masalah dalam masyarakat yang dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang masalah-masalah pelanggaran lalu lintas dalam masyarakat Menalar/ Mengasosiasi - Mengelompokkan hasil wawancara dari berbagai sumber berkaitan dengan berbagai masalah keberagaman dalam masyarakat			Jakarta 5. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik, 2008 <i>Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs, Kelas IX Edisi 4</i> Jakarta: Depdiknas. 6. Referensi atau Internet sesuai materi pokok 7. Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan</i>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				• <u>Mengelompokkan hasil wawancara dari berbagai sumber berkaitan dengan berbagai masalah pelanggaran lalu lintas dalam masyarakat</u> • <u>Menentukan hubungan berbagai masalah yang muncul dengan keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya.</u> • <u>Menentukan hubungan berbagai masalah yang muncul berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat dan cara pemecahannya</u> • <u>Menyimpulkan berbagai alternative pemecahan masalah dan menyusun rencana tindakan</u> • <u>Menyimpulkan berbagai alternative pemecahan masalah</u>			MTs. Jakarta 8. UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang <i>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i>. 9. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				<u>pelanggaran lalu lintas dan menyusun rencana tindakan</u> Mengomunikasikan • Menyajikan hasil telaah rencana tindakan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat • <u>Menyajikan hasil telaah rencana tindakan dalam rangka menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat</u> • Mencoba menyusun ikrar/komitmen bersama untuk menjaga kedamaian dalam keberagaman di masyarakat • <u>Mencoba menyusun ikrar/komitmen bersama untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.</u>			

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				Menerapkan kehidupan yang aman, damai dan tidak melakukan korupsi dalam keberagaman			

C. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Sekolah	: SMP Indonesia
Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas/ Semester	: IX/I
Materi Pokok	: Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
Alokasi Waktu	: 4 Pertemuan (1 pertemuan 3 x 40 Menit)

A. Kompetensi Inti:

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1. Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa	Pertemuan 1 1. Mensyukuri proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang diberkahi Allah SWT. 2. Meyakini kebenaran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 3. Mendeskripsikan ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara
2.1. Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dengan dinamika perkembangan jaman	
2.2. Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa	
3.1 Memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	Pertemuan 2 4. Mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman 5. Menelaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman
4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	
	Pertemuan 3

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
sesuai dinamika perkembangan jaman	6. Menuliskan <u>contoh pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam penerapan peraturan lalu lintas baik ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik. seperti menaati rambu-rambu lalu lintas, menghormati pengguna jalan, efektif dalam dalam perjalanan, mengutamakan rasa aman (menggunakan sabuk pengaman), dan nyaman (tidak saling menyerobot), membuat pengaturan tempat parkir di sekolah secara musyawarah untuk kepentingan bersama warga sekolah.</u> 7. Menunjukkan <u>perilaku disiplin, seperti tidak terlambat masuk sekolah/kelas, mengerjakan tugas yang diberikan guru, menyerahkan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai peraturan sekolah, menghormati guru dan teman, menjaga keamanan dan kenyamanan kelas dan lingkungannya.</u> Pertemuan 4 8. <u>Mempresentasikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman termasuk nilai-nilai positif dalam berlalu lintas.</u>

C. Materi Pembelajaran

1. Pancasila sebagai dasar negara.
2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
3. Ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara
4. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman
5. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman dalam berbagai kehidupan.
6. Pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam penerapan peraturan lalu lintas baik ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik. seperti menaati rambu-rambu lalu lintas, menghormati pengguna jalan, efektif dalam dalam perjalanan, mengutamakan rasa aman (menggunakan sabuk pengaman), dan nyaman (tidak saling menyerobot), membuat pengaturan tempat parkir di sekolah secara musyawarah untuk kepentingan bersama warga sekolah.

Pengembangan Materi Pendidikan Lalu Lintas

Kita wajib bersyukur bahwa proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 telah diberkahi Allah SWT. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sosial. Selain sebagai dasar negara Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman setiap warga negara dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan perkembangan jaman. Sebagai dasar negara, Pancasila dilambangkan dengan burung Garuda seperti gambar di bawah ini.



Pancasila sebagai dasar negara artinya bahwa Pancasila menjadi landasan dan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian maka seluruh peraturan perundangan di Indonesia harus berpedoman atau mengacu kepada Pancasila. Selain itu Pancasila juga menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan/ peraturan perundang-undangan dan pengawasan serta evaluasi. Penyelenggaraan dan pengelolaan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sebaliknya harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Selain sebagai dasar negara Pancasila juga merupakan pandangan hidup (*way of life*) bangsa Indonesia karena telah diyakini kebenaran dan kebajikannya. Artinya bahwa Pancasila menjadi dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang dan menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan jaman.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka sampai saat ini. Oleh karena itu sudah selayaknya kita meyakini kebenaran Pancasila tersebut, walaupun dalam sejarah perkembangannya terdapat berbagai ancaman dan usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara, namun Pancasila tetap kokoh berkedudukan sebagai dasar negara.

Nilai-nilai Pancasila tersebut dalam implementasinya disesuaikan dengan dinamika perkembangan jaman dan dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai contoh dalam penerapan peraturan lalu lintas. Ditinjau dari dimensi hukum setiap individu wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas seperti ketika lampu lalu lintas merah maka pengendara kendaraan harus berhenti, menyeberang pada zebra

cross, tanda marka jalan tidak terputus-putus maka dilarang menyalip dan lain sebagainya.



Ditinjau dari dimensi sosiologi, bahwa setiap individu hendaknya menerapkan etika berlalu lintas seperti ketika mau belok atau menyalip harus menyalakan lampu sen, memberi kesempatan pengendara lain yang akan mendahului/menyalip, tidak menggunakan jalan untuk berdagang, dan lain sebagainya.

Ditinjau dari dimensi ekonomi, bahwa setiap individu hendaknya mengembangkan sikap hemat dan efektif dalam perjalanan, seperti dengan tertib dan mematuhi aturan maka akan memperlancar arus lalu lintas. Demikian halnya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan diri seperti memakai helm, mengenakan sabuk pengaman, membawa SIM dan STNK. Dengan demikian maka secara psikologis setiap individu merasa nyaman dalam berlalu lintas. Selanjutnya tinjauan dari dimensi politik, bahwa setiap individu hendaknya melaksanakan kebijakan/aturan lalu lintas berdasarkan kebenaran. Oleh karena itu marilah kita menjadi pelopor dalam keselamatan berlalu lintas.



D. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru
A. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	1. Guru mengecek kondisi lingkungan/kebersihan kelas 2. Guru mempersiapkan peserta didik untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas 3. Guru mengecek kehadiran siswa. 4. Guru memberi motivasi belajar bahwa pembelajaran saat ini bermanfaat bagi siswa, selanjutnya bersyukur bahwa negara Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa yang dijadikan pedoman bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 6. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
B. Kegiatan Inti (90 menit)	1. Siswa dimotivasi dengan cara diminta untuk mengamati tayangan video suasana orang menggambar Garuda yang diiringi dengan lagu Garuda Pancasila. (<i>mengamati</i>) 2. Secara individual siswa diminta menulis pertanyaan terkait hal-hal sebagai berikut: a. Mengapa Pancasila menjadi dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa b. Mengapa Pancasila harus dipertahankan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa c. Mengapa terdapat ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara (<i>menanya</i>) 3. Peserta didik dikelompokkan (4-5 orang) siswa secara heterogen. 4. Setiap kelompok, mengidentifikasi dan menghimpun daftar pertanyaan dari seluruh anggota kelompok. (<i>mengumpulkan data/informasi</i>) 5. Siswa mencari sumber pembelajaran untuk menjawab pertanyaan (<i>mencari data/informasi</i>) 6. Siswa membaca sumber pembelajaran untuk menjawab pertanyaan (<i>mengamati</i>) 7. Siswa mendiskusikan dalam kelompok untuk mengumpulkan data dalam menjawab pertanyaan dalam Lembar Hasil Diskusi kelompok (<i>menalar</i>) 8. Siswa mengklasifikasikan jawaban-jawaban menurut sumber data (<i>menalar</i>) 9. Siswa mencermati kelengkapan jawaban. 10. Siswa menguji kembali jawaban dan dutuliskan dalam lembar hasil diskusi kelompok. 11. Siswa dalam kelompok memeriksa kebenaran jawaban 12. Siswa mepresentasikan hasil kerja kelompok, kelompok lain menanggapi presentasi (<i>mengkomunikasikan</i>) 13. Siswa dengan dipandu guru mengklarifikasi kebenaran jawaban
C. Kegiatan Penutup (20 menit)	1. Siswa dengan panduan guru menyimpulkan pembahasan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Siswa menerima bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan anugerah dari Tuhan YME bagi bangsa Indonesia. 3. Siswa meyakini kebenaran Pancasila sebagai Dasar Negara

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru
	dan pandangan hidup bangsa 4. Siswa memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan terhadap proses dan hasil pembelajaran tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 5. Guru mengadakan tes lisan kepada siswa 6. Guru memberikan tugas terstruktur sebagai berikut: a. Deskripsikan ancaman terhadap perubahan Pancasila b. Tuliskan dinamika nilai-nilai Pancasila sejak Indonesia merdeka sampai saat ini. 7. Peserta didik secara bersama-sama menyanyikan lagu "Garuda Pancasila" 8. Pembelajaran diakhiri dengan do'a dan salam

Pertemuan 2

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru
A. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	1. Guru mengecek kondisi lingkungan/kebersihan kelas 2. Guru mempersiapkan peserta didik untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas 3. Guru mengecek kehadiran siswa. 4. Guru memberi motivasi belajar bahwa pembelajaran saat ini bermanfaat bagi siswa. Selanjutnya bersyukur bahwa bangsa Indonesia berhasil menghalau ancaman yang akan merubah Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. 5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan penugasan minggu lalu. 6. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
C. Kegiatan Inti (90 menit)	1. Siswa diminta berkelompok secara heterogen (4 orang) untuk mendiskusikan tugas minggu lalu 2. Secara individu siswa diminta mencocokkan jawaban yang telah dibuat di rumah dengan jawaban temannya dalam satu kelompok (<i>menalar</i>) 3. Secara berkelompok siswa mendiskusikan kebenaran jawaban (<i>menalar</i>) 4. Siswa merumuskan jawaban hasil diskusi secara tertulis 5. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok, kelompok lain menanggapi (<i>mengkomunikasikan</i>) 6. Siswa dengan dipandu guru mengklarifikasi kebenaran jawaban
D. Kegiatan Penutup (20 menit)	1. Siswa dengan panduan guru menyimpulkan pembahasan tentang ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara dan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman 2. Siswa meyakini kekuatan Pancasila sebagai Dasar Negara 3. Siswa memahami dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman 4. Guru menanyakan kembali tentang materi pembelajaran hari ini sebagai pelaksanaan post tes secara lisan. 5. Guru memberikan tugas sebagai berikut: a. Tuliskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru
	b. <u>Tuliskan contoh pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam penerapan peraturan lalu lintas baik ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik</u> 6. Pembelajaran diakhiri dengan do'a dan salam.

Pertemuan 3

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru
A. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	1. Guru mengecek kondisi lingkungan/kebersihan kelas 2. Guru mempersiapkan peserta didik untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas 3. Guru mengecek kehadiran siswa. 4. Guru memberi motivasi belajar bahwa pembelajaran saat ini bermanfaat bagi siswa. Selanjutnya bersyukur bahwa Pancasila sampai saat ini tetap kokoh sebagai dasar nagara. 5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan penugasan minggu lalu. 6. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
B. Kegiatan Inti (90 menit)	1. Siswa diminta berpasangan (paire) dan setiap pasangan diminta membaca jawaban temannya (<i>mengamati</i>) 2. Setiap pasangan diminta untuk membuat pertanyaan terkait dari apa yang dibaca dan diamati (<i>menanya</i>) 3. Pertanyaan dari siswa ditulis dipapan tulis untuk dicarikan jawaban atau solusinya. 4. Siswa diminta untuk mencari sumber belajar untuk menjawab pertanyaaan dan solusi pemecahan masalah yang ditulis di papan tulis (<i>mengumpulkan informasi/data</i>) 5. Siswa diminta untuk berpikir dan memecahkan permasalahan yang diajukan temannya terkait dengan pokok materi (think paire = berpikir berpasang-pasangan (<i>menalar</i>)) 6. Setiap pasangan memilih pasangan lain, sehingga kelompok menjadi empat orang, dan setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk menanggapi (<i>membuat jejaring</i>). 7. Setiap kelompok mencari kelompok lain, sehingga kelompok menjadi delapan orang, dan setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk menanggapi (<i>membuat jejaring</i>). 8. Setiap kelompok membuat laporan tertulis untuk dipresentasikan 9. Guru memimpin diskusi kelas dan setiap kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya (<i>mengkomunikasikan</i>). 10. Guru memberikan klarifikasi atau pelurusan agar tidak terjadi kesalahan konsep, prinsip, dan nilai-nilai
C. Kegiatan Penutup (20 menit)	1. Guru bersama siswa membuat rangkuman materi pembelajaran. 2. Guru mengadakan tes lisan kepada siswa. 3. Guru melakukan refleksi dengan cara meminta seorang atau beberapa siswa untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pembelajaran hari ini, apakah manfaat bagi siswa belajar hari ini, apa yang yang dapat dilakukan siswa terkati topik hari ini. 4. Guru memberikan tugas kelompok sebagai berikut:

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru
	a. Kelompok 1: menyusun skenario/cerita yang ditampilkan minggu berikutnya tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman b. <u>Kelompok 2: menyusun skenario/cerita yang ditampilkan minggu berikutnya tentang pelaksanaan berlalu lintas sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u> 5. Pembelajaran diakhiri dengan do'a dan salam

Pertemuan 4

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru
A. Pendahuluan (10 menit)	1. Guru mengecek kondisi lingkungan/kebersihan kelas 2. Guru mempersiapkan peserta didik untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas 3. Guru mengecek kehadiran siswa. 4. Guru memberi motivasi belajar bahwa pembelajaran saat ini bermanfaat bagi siswa. 5. Guru menanyakan kesiapan siswa berkaitan penugasan minggu lalu. 6. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
B. Kegiatan Inti (90 menit)	1. Siswa diminta berkelompok sesuai kelompok yang telah dibentuk pada minggu lalu 2. Setiap kelompok mempersiapkan laporan tertulisnya untuk diserahkan kepada guru. (menalar) 3. Setiap kelompok mempersiapkan anggotanya untuk menyajikan sosiodrama yang telah disusun. 4. Guru memimpin penyajian sosiodrama dan kelompok lain mengamati dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya (<i>mengkomunikasikan</i>). 5. Guru memberikan klarifikasi atau pelurusan agar tidak terjadi kesalahan konsep, prinsip, dan nilai-nilai.
C. Kegiatan Penutup (20 menit)	1. Bersama siswa membuat rangkuman materi pembelajaran 2. Bersama siswa melakukan refleksi dengan cara meminta seorang atau beberapa siswa untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pembelajaran hari ini, apakah manfaat bagi siswa belajar hari ini, apa yang yang dapat dilakukan siswa terkait topik hari ini. 3. Siswa diingatkan bahwa minggu depan ulangan/tes tentang materi yang telah dipelajari selama 4 x pertemuan 4. Pembelajaran diakhiri dengan do'a dan salam

E. Penilaian, Pembelajaran Remedial, dan Pengayaan

1. Teknik Penilaian

- Penilaian sikap dengan teknik observasi, yaitu menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Instrumen yang digunakan berupa pedoman observasi teknik daftar cek.
- Penilaian pengetahuan dengan tes lisan dan tertulis bentuk uraian/essay

- c. Penilaian keterampilan (presentasi) dengan teknik observasi, yaitu menggunakan pedoman penilaian presentasi yang berisi sejumlah indikator keterampilan yang diamati.

2. Instrumen Penilaian

a. Pertemuan 1

- 1) Instrumen penilaian sikap menggunakan daftar cek yang hasil akhirnya dihitung berdasarkan modus atau dengan rumus. Lembaran ini diisi oleh siswa untuk menilai sikap spiritual dan kedisiplinan temannya dalam satu kelas (memberikan penilaian antar siswa).

Petunjuk :

Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap spiritual dan disiplin yang ditampilkan oleh temanmu, dengan kriteria sebagai berikut :

4 = apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = apabila tidak pernah melakukan

Lembar Penilaian Sikap Spiritual (K1) dan Disiplin

Nama siswa :

Kelas :

Tanggal Pengamatan :

Materi Pokok :

No	Aspek Pengamatan	Skor			
		1	2	3	4
1	Berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran				
2	Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat/presentasi				
3	Melaksanakan ibadah tepat waktu sesuai agama yang dianutnya				
4	Tidak terlambat masuk sekolah/kelas				
5	Mengenakan pakaian seragam sesuai peraturan sekolah				
6	Menyerahkan tugas tepat waktu				
7	Tidak nyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan				
Jumlah Skor					

Petunjuk penilaian:

1. Skor menggunakan skala 1 sampai 4
2. Skor maksimal adalah 4 dan skor minimal adalah 1
3. Jumlah skor maksimal $4 \times 7 = 35$
4. Rentang nilai sebagai berikut:

A (Sangat Baik) : apabila memperoleh skor 3,30 – 4,00

B (Baik) : apabila memperoleh skor 2,90 – 3,29

C (Cukup) : apabila memperoleh skor 2,40 – 2,89

D (Kurang) : apabila memperoleh skor kurang 2,40
(kurang dari 60%).

5. Perhitungan skor menggunakan rumus :

$$\frac{\text{jumlah nilai perolehan}}{\text{jumlah nilai maksimal}} \times 4 = \text{Nilai}$$

Contoh :

Angga memperoleh skor 18, maka nilainya adalah: $\frac{30}{35} \times 4 = 3,4$

Artinya Angga memperoleh predikat A (sangat baik)

6. Dapat juga menggunakan sistem modus (angka yang sering muncul), misalnya angka yang sering muncul adalah 4, maka nilainya adalah 4, artinya mendapat nilai A (sangat baik)

- 2) Instrumen penilaian pengetahuan dengan pertanyaan lisan sebagai berikut.

- a) Deskripsikan perwujudan rasa syukurmu bahwa bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai dasar negara
- b) Apakah makna gambar Garuda Pancasila?
- c) Jelaskan arti dasar negara
- d) Jelaskan arti pandangan hidup bangsa
- e) Mengapa Pancasila menjadi dasar negara Indonesia?
- f) Mengapa Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia?
- g) Sebut dan jelaskan ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara

- b. Pertemuan Kedua

- 1) Instrumen penilaian keterampilan dalam berdiskusi dan presentasi.

Lembaran ini diisi oleh peserta didik untuk menilai perilaku yang ditampakkan oleh temannya dalam berdiskusi dan presentasi di kelas (memberikan penilaian antar peserta didik).

Petunjuk: Berikan nilai 1 (kurang), 2 (cukup), 3 (baik), atau 4 (sangat baik) pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.

No	Nama	Aspek perilaku yang dinilai				Keterangan
		Mengajukan Pertanyaan	Menanggapi Pertanyaan	Menghargai pendapat teman	Runtut	
1						
2						
dst						

Petunjuk penilaian:

- Skor menggunakan skala 1 sampai 4
- Skor maksimal adalah 4 dan skor minimal adalah 1
- Jumlah skor maksimal: $4 \times 4 = 16$
- Rentang nilai sebagai berikut:

Kurang dari 1 = BT (belum terlihat)/ D

$1 \geq 2$ = MT (mulai terlihat)/ C

$2 \geq 3$ = MB (mulai berkembang)/ B

$3 \geq 4$ = MK (mulai konsisten/ membudaya) / A

- Perhitungan nilai menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah perolehan skor}}{\text{Jumlah skor maksimal}} X = \text{Nilai}$$

Contoh :

Frita memperoleh skor 14, maka perhitungannya adalah: $\frac{14}{16} X 4 = 3,5$

Frita memperoleh nilai A (mulai konsisten/membudaya)

- Instrumen penilaian pengetahuan dengan pertanyaan lisan sebagai berikut.

- Deskripsikan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima sesuai perkembangan jaman
- Deskripsikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sesuai dinamika perkembangan jaman
- Deskripsikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman

c. Pertemuan Ketiga

1) Instrumen penilaian diri sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila

Penilaian diri digunakan untuk memberikan penguatan (*reinforcement*) terhadap kemajuan proses belajar peserta didik. Lembaran ini diisi oleh peserta didik untuk menilai sikap dan perilaku diri sendiri berkaitan dengan kedisiplinan.

Petunjuk:

Berilah tanda cek (v) secara JUJUR pada kolom skor sesuai dengan sikap dan perilaku disiplin sebagai perwujudan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, dengan kriteria sebagai berikut:

4 = apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = apabila tidak pernah melakukan

Lembar Pengamatan

Nama Peserta Didik :

Kelas :

Tanggal Pengamatan :

Materi Pokok :

No	Aspek Pengamatan	Skor			
		1	2	3	4
1	Saya melaksanakan ibadah tepat waktu				
2	Saya menghormati semua guru				
3	Saya tidak terlambat masuk sekolah/kelas				
4	Saya mengenakan seragam sekolah sesuai peraturan sekolah				
5	Saya tidak menyontek ketika ulangan/ujian				
6	Saya membawa KTP kemanapun pergi				
7	Saya memiliki SIM sesuai kendaraan yang saya gunakan				
8	Saya memakai helm ketika menggunakan sepeda motor				
9	Saya mentaati rambu-rambu lalu lintas				
Jumlah Skor					

Petunjuk Penilaian :

- a. Skor menggunakan skala 1 sampai 4
- b. Skor maksimal adalah 4 dan skor minimal adalah 1
- c. Jumlah skor maksimal: $4 \times 9 = 32$
- d. Rentang nilai sebagai berikut:

Kurang dari 1 = BT (belum terlihat)/ D

$1 \geq 2$ = MT (mulai terlihat)/ C

$2 \geq 3$ = MB (mulai berkembang)/ B

$3 \geq 4$ = MK (mulai konsisten/ membudaya)/ A

- e. Perhitungan nilai menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah perolehan skor}}{\text{Jumlah skor maksimal}} X = \text{Nilai}$$

Contoh :

Frita memperoleh skor 28, maka perhitungannya adalah: $\frac{28}{35} \times 4 = 3,5$

Frita memperoleh nilai A (mulai konsisten/membudaya)

- 2) Instrumen penilaian pengetahuan dengan pertanyaan lisan sebagai berikut.

1. Tunjukkan contoh perilaku yang menggambarkan taat dalam berbagai bidang kehidupan,
2. Tunjukkan contoh perilaku yang menggambarkan jujur dalam berbagai bidang kehidupan,
3. Tunjukkan contoh perilaku yang menggambarkan tanggung jawab dalam berbagai bidang kehidupan
4. Tunjukkan contoh perilaku yang menggambarkan persatuan dalam berbagai bidang kehidupan
5. Tunjukkan contoh perilaku yang menggambarkan perilaku musyawarah dalam menyelesaikan masalah dalam berbagai bidang kehidupan
6. Tunjukkan contoh perilaku yang menggambarkan mentaati rambu-rambu lalu lintas
7. Tunjukkan contoh perilaku yang menggambarkan menghormati pengguna jalan
8. Tunjukkan contoh perilaku yang menggambarkan efektif dalam dalam perjalanan.

9. Tunjukkan contoh kondisi yang menggambarkan aman dan nyaman di jalan

d. Pertemuan Keempat

Instrumen penilaian pengetahuan dengan tes/ulangan tertulis sebagai berikut.

- 1) Deskripsikan perwujudan rasa syukurmu bahwa bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai dasar negara
- 2) Apakah makna gambar Garuda Pancasila?
- 3) Apakah makna Pancasila sebagai dasar negara?
- 4) Apakah makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa?
- 5) Mengapa Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia?
- 6) Sebut dan jelaskan ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara
- 7) Deskripsikan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima sesuai perkembangan jaman
- 8) Sebutkan minimal lima contoh perilaku yang menggambarkan kedisiplinan
- 9) Tuliskan contoh pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam penerapan peraturan lalu lintas baik ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik.
- 10) Jelaskan lima gambar tanda peraturan lalu lintas yang kamu ketahui

Petunjuk Penskoran

- 1) Skor maksimum setiap soal 10,
- 2) Skor minimum setiap soal 1,
- 3) Skor maksimum seluruh soal = $10 \times 10 = 100$
- 4) Kriteria penilaian pada tabel di bawah ini

Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keterampilan	
Rentang Angka	Huruf
3,85 – 4,00	A
3,51 – 3,84	A-
3,18 – 3,50	B+
2,85 – 3,17	B

Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keterampilan	
2,51 – 2,84	B-
2,18 – 2,50	C+
1,85 – 2,17	C
1,51 – 1,84	C-
1,18 – 1,50	D+
1,00 – 1,17	D

- 5) Rumus penilaian adalah: $\frac{\text{Jumlah perolehan skor}}{\text{Jumlah skor maksimal}} X = \text{Nilai}$

Contoh:

Dhinda memperoleh nilai 85, maka nilainya adalah: $\frac{85}{100} X 4 = 3,4$

Artinya Dhinda memperoleh predikat A⁻

1. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Pembelajaran Remedial,

- 1) dilakukan terhadap peserta didik yang memperoleh nilai di bawah KKM
- 2) dilakukan segera setelah kegiatan penilaian,
- 3) instrumen test remedial sama dengan ketika ulangan dengan variasi penomoran soal dan/atau kalimat.

b. Pengayaan

Peserta didik yang memiliki kemampuan diatas rata-rata diminta memilih satu tugas sesuai minatnya dari alternatif materi pengayaan sebagai berikut:

- 1) Membuat tulisan tentang partisipasi peserta didik sebagai warga negara dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
- 2) Membuat tulisan tentang partisipasi peserta didik sebagai warga negara dalam mengatasi ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara
- 3) Mendeskripsikan ancaman terhadap keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi ancaman tersebut.
- 4) Membuat peta konsep tentang ancaman terhadap keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan upaya-upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi ancaman tersebut.

5) Mendesripsikan partisipasi peserta didik dalam upaya tertib berlalu lintas

F. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar

1. Media/alat

- a. Gambar Garuda Pancasila
- b. Bahan Ajar pendidikan lalu lintas
- c. Buku Guru kelas IX, PPKn terbitan Kemdikbud, 2013
- d. Bahan tayang/slide terkait substansi materi pembelajaran
- e. Lembar Kerja

2. Bahan

- a. LCD proyektor
- b. Laptop

3. Sumber Belajar

- a. Bahan ajar Pendidikan lalu lintas
- b. Fajar, Arnie, 2014, Model Pengintegrasian Pendidikan lalu lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMP/M.Ts Kelas IX, Kemdikbud.
- c. Kemdikbud, 2013, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP Kelas IX. (Buku siswa)
- d. Referensi atau internet sesuai materi pokok.
- e. Sekjen dan kepaniteraan mahkamah konstitusi, 2009, berkonstitusi untuk SMP dan MTs.
- f. UUD Negara RI Tahun 1945.
- g. UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Jakarta, Februari 2016

Mengetahui,

Kepala Sekolah,

Guru Mata Pelajaran PPKn,

BAB IV

PENUTUP

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan wahana atau sarana untuk membantu guru PPKn SMP/MTs dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas.

Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator menuntut terdapatnya kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran secara optimal dengan mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan dan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik dan benar diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar pula dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dan menggunakan pendekatan, serta model-model pembelajaran inovatif dan relevan.

Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah RI Nomor No. 32 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, beserta salinannya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Strategi dasar pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berupa variasi interaksi pembelajaran di dalam kelas sebagai peletakan dasar kompetensi dan elemen esensial terkait dengan berbagai dimensi tujuan. Dengan terdapatnya Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Susilo, 2007. *Polmas Fungsi Lalu Lintas*, Ditlantas Polri, Jakarta.
- Fajar, Arnie, 2003, *Pengembangan Sikap Nasionalisme Melalui Pendekatan Sain Teknologi Masyarakat pada SMA Negeri 8 di Kota Bandung- Jawa Barat* (Tesis)
- Farouk Muhammad, 1998. *Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, PTIK Press, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia.
- Memorandum of Understanding (MoU) antara Mendiknas dan Kapolri Nomor 03/III/KB/2010 dan No. B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang "Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional."
- Republik Indonesia, Peraturan pemerintah nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010, Bahan Pengajaran Pendidikan, Etika dan Budaya Berlalu Lintas, Jakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan.
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, beserta salinannya.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah

Subono, 2009. Etika dan Budaya Berlalu Lintas, Ditlantis Polri, Jakarta